

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan sejalan dengan pelaksanaannya otonomi daerah. Pada perkembangannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara, akuntansi sektor publik ini digunakan oleh pemerintah guna mengatur keuangan daerah serta suatu bentuk tanggungjawab kepada publik. Dengan hal tersebut, semakin besar perhatian masyarakat terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan, yang diharapkan bisa memberikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Demi mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas, maka pemerintah daerah perlu memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam penyusunannya, laporan keuangan pemerintah harus disajikan dan dilaporkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan diterima publik. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem akuntansi daerah yang baik yang mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yakni adil, transparan, relevan, dapat dibandingkan serta dapat dipahami dan akuntabilitas.

Sistem akuntansi adalah suatu prosedur pencatatan dan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah data serta melaporkan informasi dan

kondisi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasi dalam bentuk laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti manager, investor, kreditur, instansi pemerintahan, dan pemakai lainnya. Laporan-laporan itulah yang nantinya akan menjadi informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh suatu organisasi, dengan mengikutsertakan tata pelaksanaannya, data, dan teknologi informasi yang dibutuhkan.

Menurut Bodnard dan Hopwood (2006), sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan sumber daya yang meliputi manusia dan peralatan yang fungsinya untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi sebuah informasi, informasi yang telah didapatkan tersebut akan dikomunikasikan kepada seseorang yang akan mengambil keputusan. Informasi yang baik adalah informasi yang tersedia pada waktunya, bermanfaat, dan dapat diandalkan. Ketika sistem informasi akuntansi tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak buruk terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai keberhasilan, tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, dan cara pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh setiap para pemakai, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah mampu memenuhi standar nilai informasi yang disyaratkan.

Dalam Rafika (2018), pada sistem informasi akuntansi terdapat berbagai kegiatan, yang salah satunya adalah kegiatan penerimaan kas yang harus mempunyai prosedur yang baik. Apabila sistem penerimaan kas tidak dilakukan dengan prosedur yang baik maka akan terjadinya kesalahan data dan kecurangan dana yang dapat merugikan berbagai pihak. Karena sistem atas penerimaan kas

adalah sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan kas, oleh sebab itu perlu adanya sistem informasi yang baik. Setiap pemerintah daerah hendaknya memiliki sistem penerimaan kas yang layak sehingga kas yang merupakan dari aktiva dapat jauh dari kata rawan dan beresiko kehilangan.

Untuk mewujudkan prosedur sistem penerimaan kas yang baik salah satu cara yang dijalani adalah penyusunan sistem penerimaan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Di era pembaruan seperti saat ini, organisasi mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat. Perubahan organisasi pemerintahan tersebut dilakukan dengan maksud tujuan agar pelayanan keuangan daerah semakin baik sehingga mudah dikontrol dan diawasi. Salah satu instansi tersebut yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat yang bertugas membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam aspek pendapatan daerah.

Karena sistem informasi akuntansi adalah segmen terpenting dari proses sistem penerimaan kas, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah : bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memiliki maksud, yaitu : penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

### 1.4 Manfaat Penulisan

#### 1. Bagi Penulis

Mempertinggi pandangan dan pemahaman di bidang sistem informasi akuntansi, mengatasi pertanyaan-pertanyaan ketidaktahuan penulis mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### 2. Bagi Akademik

Menambah kepustakaan dan memberikan masukan khususnya mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### 3. Bagi Instansi atau Perusahaan

Sebagai informasi yang bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan oleh instansi, serta diharapkan dapat menghasilkan kontribusi dalam mawariskan mimik transparan mengenai sistem informasi akuntansi.

### 1.5 Metode Penulisan

Adapun kiat akumulasi data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan akumulasi gelagat melalui metode perbincangan dengan golongan-golongan yang berhubungan dengan gelagat yang dibutuhkan.

## 2. Observasi

Observasi merupakan akumulasi gelagat dengan lantas melangsungkan analisis pada haluan yang diamati dengan mengukir sesuatu yang dibutuhkan berhubungan dengan data.

## 3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan melisankan sastra dan sesuatu yang berhubungan dengan kasus penganalisaan yang dilaksanakan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, sistematika penulisan laporan dibagi dalam lima bab. Bab I akan menelaah mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan Laporan ini. Kemudian pada Bab II membahas tentang landasan teori mengenai Sistem, Informasi, Akuntansi, Penerimaan Kas. Pada Bab III membahas tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari Visi dan Misi, Sejarah, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pada Bab IV membahas tentang hasil kegiatan magang yang berisi tentang pembahasan mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Terakhir pada

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi keberlangsungan aktivitas instansi.



